

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menemukan bahwa aktor supra negara juga memiliki peran yang signifikan dalam upaya penanganan permasalahan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor supra negara dalam hubungan internasional yang memiliki peran dalam membuat suatu program atau agenda yang di implementasikan di berbagai negara. Organisasi Internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui program *Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-scale Gold Mining* (GOLD-ISMIA). Adapun isu yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah pengurangan penggunaan merkuri dalam pertambangan rakyat di Indonesia.

Kesadaran masyarakat global terhadap bahaya penggunaan merkuri bagi kelangsungan kehidupan umat manusia semakin memuncak dengan disepakatinya Konvensi Minamata untuk Merkuri (*the Minamata Convention on Mercury*) pada Januari 2013. Penggunaan merkuri pada kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu isu global yang hendak ditangani melalui Konvensi Minamata. Isu global tersebut dihadapi oleh banyak negara di dunia dan mengancam keamanan, keselamatan dan kesehatan umat manusia beserta lingkungannya.

Penggunaan merkuri dalam kegiatan penambangan emas telah mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan lingkungan di Indonesia. Kondisi ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyusun tatanan politik dan hukum untuk mengurangi bahkan menghapuskan

penggunaan merkuri dalam kegiatan penambangan. Prinsip adanya keberlanjutan dan wawasan lingkungan harusnya menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pertambangan emas. Namun dalam realitanya, dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya belum terintegrasi secara berimbang, dan bahkan bisa dikatakan kepentingan lingkungan sebagai aspek penting dalam kegiatan pengelolaan pertambangan tidak diakomodir. Oleh karena itu, kerjasama internasional, termasuk dukungan finansial dan transfer teknologi, diperlukan untuk mempromosikan tindakan pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri di Indonesia.

Dalam usaha-usaha menanggulangi kompleksitas masalah merkuri di Indonesia, UNDP memberikan pendampingan dan praktik teknis kepada para aktor yang terlibat dalam program GOLD-ISMIA. Proyek ini sudah diusulkan kepada GEF untuk mendapatkan pendanaan sejak tahun 2016 dan mulai di implementasikan pada tahun 2019. Untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran, maka dilakukan kolaborasi dari berbagai sektor yang berpengaruh dalam penggunaan merkuri di ASGM. Penambangan emas di negara berkembang dapat diatur dan diregulasi, dengan mekanisme untuk melindungi pekerja dan lingkungan hidup. Proyek ini akan mendukung peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mempercepat pengurangan dan penghapusan merkuri di ASGM.

Dalam penelitian ini digunakan konsep *global governance* dan *sustainable development* untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan konsep tersebut penelitian ini membuktikan adanya upaya UNDP dalam isu pengurangan penggunaan merkuri di Indonesia melalui program GOLD-ISMIA. Pertama, inisiasi UNDP dalam program GOLD-ISMIA termasuk ke dalam *global governance* karena beberapa faktor diantaranya keterlibatan aktor supra negara dan kerangka hukum internasional sebagai kebijakan lintas batas negara. UNDP

menjadi aktor utama dalam program ini didukung dengan pendanaan GEF memiliki tujuan mengurangi atau menghilangkan pelepasan merkuri di Indonesia serta meningkatkan kualitas kehidupan para penambang sementara pada saat yang sama mengakhiri dampak lingkungan yang berbahaya. Selain itu, UNDP juga menggandeng beberapa pihak baik dari *civil society* maupun *private sector*.

Prinsip *global governance* juga digunakan melalui kerangka hukum internasional dalam hal ini Konvensi Minamata. Program GOLD-ISMIA ini termasuk dalam rangkaian program GEF-GOLD yang dilaksanakan secara bersamaan di delapan negara. Melalui program ini mendukung negara untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Konvensi Minamata untuk mengurangi atau menghapuskan penggunaan merkuri khususnya dalam ASGM.

Konsep *sustainable development* juga digunakan karena UNDP sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pembangunan memiliki agenda internasional yang harus dicapai negara-negara di dunia yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam program ini, UNDP mendukung komitmen Indonesia dalam implementasi SDGs khususnya dalam bidang lingkungan untuk mengurangi atau menghapuskan penggunaan merkuri di sektor ASGM. Terdapat enam tujuan dalam SDGs yang menjadi fokus Indonesia untuk program GOLD-ISMIA ini seperti pengurangan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan yang universal, memastikan kesehatan yang universal, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat untuk penanganan merkuri di sektor ASGM.

Dari sinilah penelitian ini menemukan beberapa upaya yang dilakukan UNDP dalam upaya pengurangan penggunaan merkuri di pertambangan rakyat Indonesia

melalui program GOLD-ISMIA, upaya tersebut diantaranya yang pertama, memperkuat lembaga dan kerangka kerja kebijakan / peraturan untuk ASGM bebas merkuri. Kedua, meningkatkan akses komunitas pertambangan dalam hal pembiayaan untuk memungkinkan pengadaan teknologi pemrosesan bebas merkuri. Kemudian, meningkatkan kapasitas komunitas pertambangan untuk ASGM bebas merkuri melalui penyediaan bantuan teknis, transfer teknologi dan dukungan untuk formalisasi, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran dan menyebarkan praktik-praktik terbaik serta pembelajaran dari penghapusan merkuri di sektor ASGM.

Selain menyajikan fakta terkait penanganan permasalahan merkuri di Indonesia melalui program GOLD-ISMIA, penelitian ini memiliki relevansi dalam studi hubungan internasional. Sejak 1960-an, isu lingkungan hidup telah masuk ke dalam agenda internasional, oleh karena itu hal ini tidak lagi menjadi monopoli satu atau dua negara saja atau negara-negara dalam satu kawasan. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan dapat bersifat transnasional, sehingga penyelesaian permasalahan lingkungan tidak hanya dari negara saja tetapi aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. Konsep *global governance* dalam diskursus hubungan internasional merupakan respon terhadap semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia serta menguatnya aktor-aktor baru selain negara yang mampu menawarkan peran yang lebih beragam. Peran inilah yang digunakan oleh UNDP sebagai aktor supra-negara dalam menangani permasalahan merkuri yang semakin kompleks di Indonesia. Selain itu, adanya agenda dan komitmen global yang harus dipenuhi suatu negara mengharuskan adanya kerjasama internasional untuk mendukung pencapaian target. Dalam hal ini, Indonesia terikat dalam Konvensi Minamata yang mengharuskan Indonesia untuk mengurangi hingga

menghapuskan penggunaan merkuri khususnya di sektor ASGM. Selain itu, isu merkuri ini juga melibatkan berbagai sektor dalam pemasalahannya mulai dari lingkungan, kesehatan hingga perekonomian rakyat. Oleh karena itu, hal ini juga berpengaruh pada pencapaian pembangunan yang tercantum dalam implementasi SDGs di Indonesia.

Namun dengan berbagai temuan tersebut, penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan. Pertama, hingga tahun 2019 penelitian ini ditulis, program GOLD-ISMEA masih tergolong baru di Indonesia sehingga data dan sumber yang menjelaskan terkait program GOLD-ISMEA antara UNDP dengan Pemerintah Indonesia masih sedikit. Butuh upaya yang lebih dilakukan oleh UNDP khususnya dalam melibatkan berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam pengurangan penggunaan merkuri di pertambangan rakyat Indonesia. Upaya yang dilakukan UNDP juga belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam permasalahan merkuri di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan upaya yang dilakukan UNDP dalam pengurangan penggunaan merkuri di pertambangan rakyat Indonesia masih perlu analisis lebih lanjut dengan sumber dan data yang lebih memadai. Kedua, masih sedikit penelitian yang membahas tentang permasalahan merkuri di Indonesia khususnya dalam sektor pertambangan rakyat. Masih banyaknya area-area ASGM yang berdiri secara ilegal sehingga menyulitkan para peneliti untuk mengidentifikasi jumlah ASGM yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar area pertambangan sehingga kesadaran masyarakat akan bahaya merkuri juga masih kurang.

Dari seluruh temuan akademik yang sudah dijelaskan, dapat ditarik satu kesimpulan penelitian. Dengan menggunakan konsep *global governance* dan *sustainable development*, kapasitas institusional dan teknis yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan harus dikembangkan untuk secara efektif mengimplementasikan

kebijakan, alat, dan pendekatan yang diidentifikasi untuk mengelola pertambangan secara lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha untuk memastikan konsistensi penegakan antara kerangka hukum domestik dengan hukum internasional. Melalui regulasi, pemantauan dan tindakan terkoordinasi di dalam pemerintah dengan pihak yang terlibat dalam ASGM, banyak dampak lingkungan dapat dikurangi. Semakin banyak konsultasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pertambangan dapat mempengaruhi kehidupan mereka untuk melindungi hak-hak dan mata pencaharian mereka serta untuk pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui program GOLD-ISMIA, UNDP berkontribusi dalam penanganan permasalahan merkuri di Indonesia dan mendorong Indonesia untuk memenuhi kewajibannya dalam implementasi Konvensi Minamata dan mewujudkan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan yang tercantum dalam SDGs.

Dari tantangan yang akan di hadapi UNDP dan Pemerintah Indonesia dalam implementasi program GOLD-ISMIA, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan program ini kedepannya. Berikut beberapa rekomendasi dari peneliti terkait program GOLD-ISMIA:

- 1) Pemerintah pusat harus memastikan penataan dan aturan domestik yang koheren satu sama lain dan cukup rinci yang berfungsi sebagai perangkat inti untuk mengatur pertambangan rakyat. Selain itu, koordinasi antar badan-badan pemerintah baik di nasional maupun di daerah harus ditingkatkan sehingga pelaku kegiatan memiliki akses untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah untuk teknik yang ramah lingkungan.
- 2) Memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak diberikan sosialisasi sebelum proyek dilaksanakandan peningkatan kesadaran akan dampak merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan mereka.

- 3) Meningkatkan akses informasi terkait pertambangan yang penting dan relevan bagi masyarakat lokal dan membina budaya transparansi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.
- 4) Membuka jalan hukum bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang terkena dampak penambangan untuk memiliki hak berpendapat dalam proyek dan menyediakan akses pemulihan bagi orang-orang yang terkena dampak penambangan.
- 5) Potensi sumber merkuri lainnya sebagai produk samping dari sektor minyak dan gas, perlu diinventarisasi, diatur dan dipantau agar merkuri yang ditangkap atau diproses tidak diedarkan ke pasar lagi. Teknologi pengolahan emas tanpa kimiawi perlu didorong dan diperkenalkan dibarengi dengan pembinaan teknis dan dalam konteks Rencana Aksi Daerah penghapusan merkuri di tambang emas skala kecil.